

ANALISIS ISI DALAM REGULASI NARKOBA DI FILIPINA TAHUN 2016-2018

Oleh:

MEIDIKA NUR SASMITO

ABSTRAK

Peredaran narkoba di Filipina telah berkembang pesat sehingga menjadi ancaman sosial dan keamanan. Masalah narkoba ini jika tidak di tanggapi secara serius, akan berakar pada masalah keamanan negara yang lebih serius. Banyaknya kekacauan dan kejahatan yang ditimbulkan oleh para pengguna narkoba secara terus-menerus tentunya akan mengganggu stabilitas pemerintahan dan keamanan dalam negeri. Dalam menanggapi masalah narkoba, Filipina mengesahkan undang-undang yang mengatur tentang narkoba. Diantaranya adalah *Republic Act No. 9165* atau yang biasa disebut *Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002*, *Republic Act No. 10640 Series of 2013*, *Executive Order No. 15 Series of 2017*, *Executive Order No. 218 Series of 2013*, *Command Memorandum Circular No. 16 Series of 2016*, *Dangreous Drugs Board Regulation No. 2 Series of 2007* dan yang terakhir adalah *Dangerous Drugs Board Regulation No. 1 Series of 2016*.

Undang-Undang yang mengatur tentang narkoba di Filipina telah di amandemen dengan demikian rupa serta dilengkapi dengan berbagai regulasi untuk menekan peredaran dan perkembangan narkoba di Filipina. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa paradigma yang digunakan dalam menentukan arah kebijakan keamanan di Filipina dalam 7 dokumen produk regulasi dengan menggunakan metode *content analysis*. Analisa terhadap indikator yang mewakili dua paradigma, yaitu realisme dan liberalisme menunjukkan bahwa 7 dokumen produk regulasi tentang narkoba di Filipina sangat dipengaruhi oleh paradigma realisme.

Kata Kunci: Analisis Isi, Narkoba, Paradigma, Realisme.

CONTENT ANALYSIS OF THE PHILIPPINES DRUG REGULATION (2016-2018)

By :

MEIDIKA NUR SASMITO

ABSTRACT

Drug trafficking in the Philippines has grown so rapidly that it has become a social and security threat. If this drug problem not taken seriously, will cause more serious state security problems. The many disorder and crimes caused by drug users continuously will certainly disrupt the stability of government and internal security. In response to drug problems, the Philippines Government passed a law regulating drugs. For example, Republic Act No. 9165, otherwise known as The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Republic Act No. 10640 Series of 2013, Executive Order No. 15 Series of 2017, Executive Order No. 218 Series of 2013, Command Memorandum Circular No. 16 Series of 2016, Dangreous Drugs Board Regulation No. 2 Series of 2007 and the last is Dangerous Drugs Board Regulation No. 1 Series of 2016.

The laws of drug in the Philippines have been amended in such a way and are equipped with various regulations to reduce the circulation and development of drugs in the Philippines. This paper aims to analyze the paradigm used in determining the direction of security policies in the laws of drug using the content analysis method. Analysis of indicators that represent two paradigms, realism and liberalism which shows that the laws of drug in the Philippines are strongly influenced by the realism paradigm.

Keywords: *Content Analysis, Drug, Paradigm, Realism.*